

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

Nomor

: UM 0102-Sh/346

Jakarta, 10 Juni 2024

Sifat

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

: Undangan

Rapat Pembahasan , Indeks

Reformasi Hukum di Kementerian PUPR

Yth.

(daftar undangan terlampir)

di -

JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terkait penilaian Indeks Reformasi Hukum, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal

: Kamis-Jumat/ 13-14 Juni 2024 (Jadwal Terlampir)

Tempat

: Luminor Hotel Padjadjaran Bogor

Jl. Cidangiang No.9, RT.004/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor

Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127

Agenda

: Pembahasan Indeks Reformasi Hukum

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Adapun ketentuan bagi peserta adalah sebagai berikut:

- Panitia penyelenggara hanya menyediakan konsumsi selama penyelenggaraan acara, sedangkan akomodasi dan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing unit pengutus;
- 2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person:
 - a) Fitri Indrivati (081281668642)
 - b) Novita Retno (085546357334)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, SH

NIP. 196605112003121002

PUBLIK IN

Lampiran I

Nomor: UM 0102-Sh/346 Tanggal: 10 Juni 2024

DAFTAR UNDANGAN:

Kementerian Hukum dan HAM

- 1. Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM;
- 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
- 4. Kepala Pusat JDIHN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan;
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 9. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- 10. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
- 11. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri;
- 12. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 13. Kepala Biro Keuangan
- 14. Kepala Biro Umum
- 15. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 16. Kepala Biro Komunikasi Publik;
- 17. Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan;
- 18. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- 19. Plt. Kepala Biro Hukum;
- 20. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum;
- 21. Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal:
- 22. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 23. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 24. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- 25. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan;
- 26. Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- 27. Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 28. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 29. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- 30. Kepala Bidang Dukungan Teknis Pimpinan;
- 31. Subkoordinator Urusan Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus;
- 32. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
- 33. Para Ketua Tim Kerja di Bagian Peraturan Perundang-undangandan Kepatuhan Intern, Biro Hukum:
- 34. Staf di Bagian Perundang-undangan dan Kepatuhan Intern, Biro Hukum.

Lampiran II

Nomor : UM 0102 - 5h/346

Tanggal: 10 Juni 2024

SUSUNAN ACARA

Waktu	Agenda	Keterangan
Kamis, 13 Juni 20	24	
09.30 - 10.00	Registrasi	Panitia dan Peserta
10.00 – 10.30	Pembukaan	Plt. Kepala Biro Hukum
10.30 – 12.00	Panel : Penjelasan Umum IRH secara keseluruhan	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM
12.00 – 14.00	ISHOMA	
14.00 – 16.00	Panel: 1. Paparan Dokumentasi Proses Pembentukan Peraturan untuk memenuhi IRH Variabel 1 2. Paparan Kebutuhan Pembinaan Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan dan Analis Hukum untuk memenuhi IRH Variabel 2	1. Direktur Harmonisasi Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM 2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN 3. Kepala Pusat JDIHN 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM
16.00 – 18.00	Panel: 1. Paparan Teknik Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan untuk Memenuhi IRH Variabel 3 2. Paparan Standar Pengelolaan JDIH untuk memenuhi IRH Variabel 4	
Jumat, 14 Juni 202	24	
10.00 – 11.30	Tindak Lanjut Strategi Pengisian Variabel 1 dan data dukung	Biro Hukum
11.30 – 14.00	Ishoma	Panitia dan Peserta
14.00 – 15.30	Tindak Lanjut Strategi Pengisian Variabel 2 dan data dukung	Biro Hukum
15.30 – 17.00	Tindak Lanjut Strategi Pengisian Variabel 3 dan data dukung	Biro Hukum
17.00 – 18.30	Tindak Lanjut Strategi Pengisian Variabel 4 dan data dukung	Biro Hukum